

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 17

BPK Endus Pemborosan di Proyek Energi

Terjadi pemborosan uang negara di proyek listrik dan suplai migas.

Fery Firmansyah
fery_f@tempo.co.id

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt serta pengelolaan rantai suplai minyak dan gas. Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, masalah ini muncul akibat tidak ada perencanaan yang tepat dan pengendalian internal yang memadai, baik oleh PT PLN (Persero) maupun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas).

Khusus untuk PLN, menurut Harry, masalah ini menimbulkan pengeluaran sebesar Rp 609,54 miliar dan US\$ 78,69 juta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). "Yang tidak memberikan manfaat," kata Harry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. PLN, Harry menambahkan, juga belum menegenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU sebesar Rp 704,87 miliar dan US\$ 102,26 juta.

BPK, yang memeriksa

proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt periode 2006-2015, menyimpulkan PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan belum bisa menjamin kesesuaian jalannya proyek dengan ketentuan serta kebutuhan teknis yang ditetapkan. Harry mengatakan kasus yang mendapat perhatian BPK ialah pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 Nusa Tenggara Barat di Lombok, serta PLTU Kalimantan Barat 2 yang mangkrak. Ada juga proyek PLTU Kalbar 1 yang berpotensi terbengkalai.

Adapun untuk SKK Migas, BPK menyimpulkan

pengelolaan rantai suplai dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BPK pun menemukan pemborosan uang negara senilai Rp 3,63 miliar akibat biaya *review* proyek EPC-4 oleh konsultan independen serta potensi kemahalan harga atas sewa kapal penunjang operasi senilai US\$ 41,89 juta.

Untuk menyelesaikan masalah di SKK Migas, BPK meminta Ketua Komisi Pengawas SKK Migas memberikan surat peringatan kepada pim-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 17

BPK Endus Pemborosan di Proyek Energi

pinan untuk lebih cermat memperhatikan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. BPK juga meminta Kepala SKK Migas memperingatkan pimpinan KKKS untuk menyampaikan laporan berkala serta tidak membebankan biaya konsultan ke dalam biaya operasional.

Kepada Direksi PLN, BPK merekomendasikan untuk mengkaji perencanaan, pelaksanaan, serta operasi proyek PLTU 10 ribu megawatt. Direksi juga diminta bertanggungjawabkan biaya tambahan untuk seluruh PLTU 10 ribu megawatt kepada pemegang saham serta memberi sanksi kepada para pelaksana kegiatan

dan pejabat bertanggung jawab yang kurang cermat.

Menanggapi temuan BPK, juru bicara PLN, Made Suprateka, menyatakan akan melakukan *assessment* untuk mengevaluasi kelanjutan proyek yang mangkrak. Sedangkan SKK Migas menyatakan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti mengkaji pencatatan data/informasi kapasitas nasional dan menyurati KKKS agar memenuhi kewajiban penyampaian laporan. SKK Migas juga menyatakan penunjukan konsultan dalam rangka evaluasi dan hasilnya digunakan sebagai data untuk pengambilan keputusan.

● AHMAD FAIZ | ROBBY IRFANY